

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Subjek pembangunan kesehatan selalu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan, serta pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Pemerintah Indonesia mengatur masalah ini dalam UU Pembangunan Kesehatan No. 25 Tahun 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat serta meningkatkan ketahanan dan daya saing dalam pembangunan kesehatan nasional. (Sakti, 2022).

Salah satu masalah kesehatan nasional yang sangat perlu mendapat perhatian adalah perlambatan gizi atau *stunting*. Masalah *stunting* berimplikasi pada berbagai aspek pembangunan kesehatan, oleh karena itu perhatian terhadap penurunan pertumbuhan menjadi sangat penting. Efek tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama bersifat jangka pendek, seperti; perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme tubuh, dan yang kedua bersifat jangka panjang, seperti; gangguan kemampuan kognitif dan aktivitas belajar serta melemahnya daya tahan tubuh anak. sehingga mereka mudah sakit di usia tua dan berisiko tinggi terkena diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan kecacatan. Akumulasi kedua dampak tersebut dapat melemahkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas serta daya saing negara (Rengga, 2019).

Pada tahun 2018, jumlah anak terbelakang (*stunting*) di seluruh dunia adalah 79,55 anak atau sekitar 3,8%, dan dapat juga diperkirakan ada sekitar 8,7 juta dari seluruh anak di dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia dini di dunia menderita gangguan kesehatan berupa *stunting*. Kementerian kesehatan menetapkan angka target penurunan *stunting* mencapai 14% di Tahun 2024. Oleh karena itu, sangat penting bahwa masalah ini segera ditangani oleh pemerintah bekerja sama dengan perangkat desa, termasuk keterlibatan masyarakat. (WHO, 2018).

Berdasarkan data angka balita *Stunting* di Indonesia, pada tahun 2019 sebanyak 6.538.564 anak atau sekitar 27,67%. Meski angka ini turun 1 persen dari tahun lalu, namun belum bisa dikatakan aman karena prevalensi *stunting* belum mencapai batas atas 2 persen standar WHO, atau seperlima dari jumlah anak remaja. lima Sehingga, *stunting* terus menjadi masalah kesehatan masyarakat nasional. Gearing mempengaruhi pembangunan negara dari berbagai sektor. Bayi dengan *stunting* biasanya memiliki kemampuan yang kurang baik dan menghambat pertumbuhan bayi, sehingga bayi *stunting* cenderung memiliki tubuh yang lebih pendek dibandingkan dengan anak pada umumnya. (Kemkes, 2018).

Data pemantauan status gizi Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sebanyak (32,4%) anak balita mengalami *stunting*. Pada tahun 2019, sebanyak 491 anak atau sekitar (30,11%). Angka tersebut menurun 2% persen pada tahun 2022 dengan total 393 anak, namun data ini masih termasuk dalam kategori 25 kabupaten/kota administratif yang cukup serius untuk tidak mencapai target penurunan 14 persen yang ditetapkan oleh Pemprov Sumut menjadi ditujukan. . (Lusiaturun & Adethia 2022). Dari 25 kabupaten tersebut, lima diantaranya adalah

Kabupaten Langkat dengan jumlah balita terbanyak (23,2 %), Nias (23%), Pakpak Barat (21,3%), Mandailing Natal (3 %) dan Gunung Sitoli (5,34%) bayi/anak stunting (Riskesdas, 2019).

Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi *stunting* di Langkat tahun 2018 sebesar 23,2 % anak balita (balita) mengalami *stunting*. Pada 2019, jumlah balita turun menjadi 23,3 persen. Menurut (Pemerintah Kabupaten Langkat, 2020), penurunan Kabupaten Langkat sebesar 18,23%. Namun, hal tersebut bukan target yang ditetapkan oleh Gubernur Langkat, karena itu Pemkab Langkat tetap menekankan angka *stunting* dengan nilai target 1 persen. (Pemkab Langkat, 2020)

Setelah tujuan tersebut ditetapkan, lahir SK Bupati Langkat no. 1 Tahun 2018, mengenai Pengurangan angka *Stunt Gizi (stunting)* Melalui Pelayanan Kesehatan Lintas Sektor dan Intervensi Masyarakat. Regulasi ini dicapai dengan peningkatan status gizi masyarakat yang berkualitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui strategi seperti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan melalui gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Ini dapat meningkatkan gerakan dalam seribu hari pertama kehidupan. (Dinkes, 2018).

Bupati Langkat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Konvergensi Percepatan Pencegahan *stunting*, memasukkan program ini dalam RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024 Program Peningkatan Kesehatan yang masuk dalam Indeks Pembangunan Masyarakat. (F. Rudmini, 2020).

Saat menerapkan program anti setrum di tingkat operasional (penanggulangan masalah *stunting*), pencapaian tujuan tentunya membutuhkan

keterlibatan masyarakat. Saputri (2019) menemukan dalam penelitiannya bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan program pencegahan kendala di Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, penelitian Estut (2014) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu berbasis masyarakat bidang tumbuh kembang anak di Desa Margowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung menyimpulkan bahwa masih banyak kegiatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. ikut. program pencegahan hambatan, termasuk senam prenatal. Kegiatan yang berhubungan dengan slow feeding, kegiatan imunisasi dan penyuluhan kegiatan (Saputi, 2019).

Pemantauan pertumbuhan anak usia dini sangat penting karena membantu mendeteksi kegagalan tumbuh kembang anak sejak usia dini dan metode ini merupakan alat untuk mengetahui status gizi anak usia di bawah 5 tahun. Salah satu kegiatan berbasis masyarakat adalah pemantauan tumbuh kembang anak Posyandu. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dengan balita dipantau status gizi, tumbuh kembangnya dari (0-3) bulan sampai (1-5) tahun. Indikator kesehatan dapat dicapai dengan ini (Nisak, 2021)

Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan sekaligus sebagai sarana untuk menilai status gizi balita. Oleh karena itu, Posyandu berperan penting dalam pemantauan status gizi masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan merupakan indikator kinerja pelayanan Posyandu yang meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular melalui vaksinasi, pencegahan dan gizi diare, serta penimbangan bayi.

Kelompok sasaran posyandu adalah ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Strategi kesehatan memiliki nilai dalam pengembangan sumber daya manusia pada tahap awal (S. Puspita, 2018). Menurut (Devianti 2013) bahwa tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat, sangat sulit untuk melaksanakan keberhasilan program pembangunan karena masyarakat adalah pelaku (subjek) dan tujuan (objek). Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin efektif program Posyandu.

Berdasarkan data Puskesmas Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah balita terbanyak (penderita *Stunting*) pada tahun 2019, yaitu 23,6% laki-laki sebanyak 19 anak dan 9 balita perempuan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah anak balita sebesar 22,6%, 19 anak laki-laki dan 8 anak perempuan, berdasarkan data ini dari tahun 2019-2020 terjadi penurunan 1 anak, namun masih tergolong tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan petugas gizi Puskesmas Pangkalan Susu diperoleh informasi bahwa petugas mengaku angka retardasi mental di wilayah kerja Puskesmas Pangkalan Susu mengalami penurunan. Pejabat itu mengatakan itu karena rendahnya keterlibatan masyarakat dalam memerangi stunting. Indikator kurangnya partisipasi masyarakat bersumber dari kurangnya informasi publik tentang kegiatan yang diselenggarakan.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2020) di wilayah kerja Puskesmas Kota Banda Aceh ditemukan adanya kekurangan ilmu dan ternyata ilmu yang diberikan tidak begitu menguntungkan. dan rendahnya minat masyarakat dalam memantau tumbuh kembang anak di Posyandu mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat.

Selain itu, masih terdapat posyandu yang tidak mudah dijangkau karena sulitnya jarak tempuh petugas kesehatan untuk melintasi tempat atau daerah yang sulit dijangkau dengan perahu. Dengan kata lain pihak berwenang kesulitan memantau tumbuh kembang anak di desa-desa yang jauh dari pusat perkotaan.

Pemerintah setempat juga berkomitmen bahwa dana desa akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti makan-makanan bergizi, roti, kacang hijau dan susu. Namun bantuan ini tidak diikuti dengan komentar baik dari masyarakat setempat. Sehingga hal ini membuat Puskesmas agar melakukan pendistribusian bantuan dan penyuluhan dengan mendatangi langsung setiap rumah masyarakat.

Oleh karena itu pihak Puskesmas berusaha menginformasikan kepada masyarakat melalui mediator kader Kelompok Penggerak dan Pemberdayaan Keluarga (TP PKK: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), namun cara tersebut dinilai kurang efektif karena informasi tidak tersampaikan secara merata kepada masyarakat sehingga jumlah peserta yang datang tidak baik. tidak mencapai jumlah yang dibutuhkan. Kemudian pihak Puskesmas melakukan evaluasi dan melakukan perubahan dengan menyiarkan informasi tersebut melalui pengeras suara dengan fasilitas mushola yang ada di wilayah tersebut, namun partisipasi masyarakat masih jauh dari yang diharapkan.

Puskesmas memperkirakan informasi yang disampaikan melalui (pengeras suara) guna menjangkau seluruh masyarakat sekitar, sehingga Puskesmas menilai dan mengevaluasi rendahnya keterlibatan masyarakat dalam keikutsertaan dalam program pengendalian *stunting*. Setelah Puskesmas memperkirakan rendahnya partisipasi masyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat program pencegahan *stunting* bagi masyarakat itu sendiri, kemudian kurangnya

minat masyarakat untuk menangani masalah stunting tersebut secara kolektif. Oleh karena itu, informasi yang diberikan oleh penekan mungkin tidak dapat diterima dengan baik dan justru dapat menyebabkan kecepatan melambat. Hasilnya adalah program yang kurang optimal selama lima tahun terakhir.

Berdasarkan penjelasan dan keterangan di atas peneliti sangat tertarik untuk menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan *Stunting*, sehingga peneliti memutuskan penelitian ini dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Penanggulangan *Stunting* di Wilayah Kerja Puskesmas Pangkalan Susu”.

1.2 Rumusan Masalah

Pencapaian program dalam penanggulangan *stunting* tidak dapat terlepas dari program dan dukungan masyarakat. Sementara partisipasi masyarakat di wilayah Puskesmas Pangkalan Susu masih terbelang belum maksimal dikarenakan beberapa masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah ini adalah “Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Pangkalan Susu?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan umum
Menganalisis partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan *stunting* di wilayah kerja puskesmas Pangkalan Susu
2. Tujuan khusus
 - a. Menggambarkan pelaksanaan program penanggulangan *stunting* di wilayah kerja puskesmas Pangkalan Susu

- b. Menggambarkan faktor Internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan *stunting*, meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan.
- c. Menggambarkan faktor Eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan *stunting*, meliputi penghargaan, kebutuhan masyarakat dan pengetahuan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah:

1. Bagi Peneliti, dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.
2. Bagi Informan, dapat menambah pengetahuan dan informasi dalam mencegah dan menanggulangi *stunting*.
3. Bagi Puskesmas, dapat menjadi masukan untuk lebih aktif lagi dalam memantau perkembangan status gizi balita dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Bagi Intitusi Pendidikan, dapat dapat menjadi suatu acuan dalam penyajian masalah *stunting* dan juga sebagai panduan untuk penelitian lain yang ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai penanggulangan *stunting*.